



# Buletin Parlementaria

Nomor 985/III/XI/2017 • November 2017

**Fadli Zon Terima Kunjungan  
Perwakilan Kedubes Polandia**

**Luas Lahan Jadi Kendala  
Peningkatan Produksi Garam**

PRESS GATHERING

SAHNI PIMPINAN DPR RI  
NINA PRI

**Hubungan  
Pimpinan DPR dengan  
Wartawan Diharapkan  
Semakin Harmonis**

TIDAK  
DIPERJUAL  
BELIKAN



Plt. Sekjen DPR Damayanti saat berbicara pada acara Press Gathering di Banyumas, Jateng, Jum'at(3/11)

## Hubungan Pimpinan DPR dengan Wartawan Diharapkan Semakin Harmonis

Plt Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti berharap kegiatan Press Gathering antara Pimpinan, Anggota, Sekretariat Jenderal DPR dengan Wartawan mampu mempererat hubungan yang harmonis. Mengingat peran penting wartawan dalam menyebarkan informasi tentang apa yang terjadi di DPR, sehingga kedua stakeholder tersebut harus terjalin hubungan baik.

**M**enurut Damayanti, Setjen DPR membutuhkan peran wartawan dalam meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap DPR. "Press Gathering ini, kan, sudah berulang, tujuannya untuk silaturahmi antara wartawan dengan Pimpinan DPR dan Kesetjengan. Diharapkan dengan adanya kerja sama ini terjadi harmonisasi antara Pimpinan DPR dengan wartawan," ujar Damayanti, Jumat, (03/11/2017).

Wartawan menurut Damayanti, memiliki peranan penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap DPR, terhadap perjuangan yang dilakukan DPR, terhadap aspirasi masyarakat yang datang semaksimal mungkin harus mampu mendapat pemberitaan dari media agar masyarakat bisa mengetahui bahwa DPR dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara sungguh-sungguh.

"Kita yang dari Kesetjengan, kan, tidak bisa menyebarkan informasi sendiri. Jadi kita butuh bantuan wartawan. Karena kalau sudah bisa disampaikan

apa yang dilakukan anggota, kan, bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perjuangan apa yang dilakukan DPR," ujar Damayanti.

Sebagai Plt Setjen DPR, Damayanti juga selalu terbuka terhadap kritik dan saran wartawan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kerja Kesetjengan sebagai sistem pendukung dalam meningkatkan kinerja DPR.

Kegiatan Press Gathering yang ketiga kalinya di tahun 2017 ini dikemas secara santai dan diiringi dengan canda tawa, suasana keakraban antara Pimpinan DPR dengan Wartawan pun terjadi. Turut serta dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan Wakil Ketua BURT Novita Wijayanti serta pejabat di lingkungan Setjen DPR. Tak hanya itu, Mantan Sekjen DPR Achmad Djuned yang merupakan putra asli Banyumas turut hadir dalam Press Gathering ini. ■

(ns/sc)/iw. Foto: Andri



# Padat Karya Cash Solusi Jitu Presiden Jokowi Dorong Daya Beli Masyarakat



Ketua DPR RI, Setya Novanto.

Pada bulan Januari 2018 mendatang, Presiden Joko Widodo akan meluncurkan program Padat Karya Cash yang diatur dalam Peraturan Presiden. Memanfaatkan dana desa sebesar Rp 60 triliun lebih serta melibatkan Kementerian Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian, program ini dapat memberikan efek besar bagi perekonomian masyarakat.

**B**agi Ketua DPR RI Setya Novanto, program Padat Karya Cash sekaligus menunjukan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat menengah ke bawah sebagai bagian dari menjalankan

amanat Sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia.

“Program Padat Karya Cash adalah solusi jitu Presiden Jokowi dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di daerah, khususnya di pedesaan. Data BPS menunjukkan, per Maret 2017 penduduk miskin di pedesaan telah mengalami penurunan, dari 17,28 juta pada September 2016 menjadi 17,10 juta pada Maret 2017. Saya yakin, melalui program Padat Karya Cash, angka kemiskinan akan kembali berkurang,” terang Novanto.

Lebih dari itu, Novanto menilai Padat Karya Cash menjadikan pemberdayaan masyarakat diselenggarakan dengan partisipatif dan mendorong terwujudnya good village governance (keperintahan desa yang baik), sehingga dapat memberdayakan masyarakat secara bijak. Bukan memberikan uang secara cuma-cuma, namun Presiden Jokowi mengajak masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan.

“Program Padat Karya Cash ini keren sekali. Masyarakat menengah bawah, terutama saudara-saudara kita yang tidak mampu, bisa memperoleh pekerjaan dan terlibat langsung dalam pembangunan di daerah dan desanya. Pembangunan jadi terus bergerak, masyarakat juga mendapatkan tambahan pemasukan. Efeknya, tentu daya beli juga akan meningkat,” jelas Novanto.

Novanto juga menjelaskan, DPR RI melalui Komisi V maupun komisi terkait lainnya, tentu akan ikut berpartisipasi dalam program Padat Karya Cash. “Kita tidak ingin program bagus yang sudah dirumuskan Presiden Jokowi ini tidak berjalan dengan baik di lapangan. DPR RI sebagai mitra kerja pemerintah dan juga dalam menjalankan fungsi pengawasan, akan terlibat aktif mengawasi jalannya program ini,” ujar Novanto. ■

**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI  
**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)  
**PIMPINAN PELAKSANA**  
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)  
**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)  
**WK. PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kabag Media Cetak),  
Ahyar Tibi, S.H (Kabag Media Analisis),  
Nita Juwita, S.Sos (Kabag MedSos dan Website)  
**REDAKTUR**  
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos  
**SEKRETARIS REDAKSI**  
Hasri Mentari, Guntur Dewanto  
**ANGGOTA REDAKSI**  
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,  
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patulli, Devi Iriandi, Hendra  
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega  
**REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra, Iwan Armanias  
**FOTOGRAFER**  
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief  
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah  
**ADMINISTRASI FOTO**  
Bagus Mudjiharjanto  
**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**  
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,  
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



## PENERBITAN

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)  
**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kabag Produksi)  
**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah,  
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,  
Nur Sakila Rahmah, S.Ikom  
**DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Drs. Karyanto (Kabag Distribusi)  
**ADMINISTRASI**  
Sjaefudin, S.Sos  
**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Mujiono  
**PHOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Arif, Lamin, Remon,  
Yuliana Puspita, Ifan, Izzu Fauzul Umam  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : penerbitandpr@gmail.com

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

(mp)/iw, Foto: Jaka



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan saat menghadiri acara Press Gathering di Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (3/11).

## Pembangunan Gedung Baru DPR Inisiatif Pemerintah

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan bahwa rencana pembangunan gedung baru DPR adalah usul dan inisiatif pemerintah. Jika masyarakat memberikan kritik kepada DPR tentu tidak tepat sasaran, mengingat jumlah anggaran yang nantinya akan digunakan berasal dari inisiatif pemerintah.

**D**emikian mengemuka saat Taufik Kurniawan menghadiri kegiatan Press Gathering yang berlangsung 2-4 November di Kabupaten Banyumas. Politisi PAN ini menegaskan bahwa pembangunan gedung baru DPR diserahkan sepenuhnya pada pemerintah, DPR tidak turut andil dalam proses pembangunan tersebut.

"Ini inisiatif pemerintah tapi kenapa DPR yang digebuk-gebuk dan dipojok-pojokkan terus. Kami sudah serahkan itu ke pemerintah.

Apakah mau melaksanakan atau tidak, itu diserahkan ke pemerintah. Kalau dibangun ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak masalah," kata Taufik di Purwokerto, Jumat, (3/11/2017).

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan gedung DPR baru bukan untuk anggota DPR periode 2014-2019 saja, tetapi untuk periode berikutnya, sehingga ini adalah aset negara yang harus dijaga. "Gedung itu nanti menjadi milik negara. Tidak mungkin gedung itu dibawa pulang anggota DPR, termasuk ke daerah pemilihan. Gedung itu juga nanti aset pemerintah yang akan digunakan

oleh anggota-anggota periode berikutnya," tegasnya.

Setjen DPR sebagai sistem pendukung juga diminta Taufik untuk bertindak transparan dan akuntabel selama pembangunan gedung baru DPR ini. Ia juga berharap agar persoalan ini tidak menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat.

Sebagaimana diketahui dalam RAPBN 2018, telah disetujui anggaran penataan kawasan DPR senilai Rp 601 miliar. Dana itu dibagi untuk pembangunan gedung baru DPR Rp 320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp 280 miliar. ■



# Fadli Zon Terima Kunjungan Perwakilan Kedubes Polandia

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Charge d' Affaires atau Kuasa Usaha Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia Igor Kaczmarczyk di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (06/11/2017). Pertemuan tersebut membahas rencana kunjungan GKSB Indonesia-Polandia dalam waktu dekat ini.

“ Kita sengaja mengundang Kedubes Polandia karena akan ada delegasi berkunjung ke Polandia untuk hubungan kerja sama antarpemerintah dan beberapa menteri, sehingga hasilnya lebih terukur,” ungkap Fadli.

Lebih lanjut, Fadli menjelaskan, beberapa sektor yang akan menjadi prioritas peningkatan kerja sama diantaranya, di bidang pendidikan, pertanian, dan pertahanan.

Di bidang pendidikan, menurut Fadli, Polandia terkenal dengan sistem pendidikan yang berkualitas diantara negara Eropa

lainnya. Sehingga, tidak menutup kemungkinan Polandia dapat menjadi alternatif baru bagi pelajar yang ingin melanjutkan studinya ke Eropa, khususnya di bidang sains dan teknologi, kesehatan dan pertanian.

“Ini kesempatan yang baik bagi mahasiswa Indonesia, semacam disertifikasi agar tidak hanya negara-negara barat tertentu yang sudah menjadi tujuan studi,” paparnya.

Selain itu, biaya pendidikan dan biaya hidup relatif murah di Polandia dengan kualitas pendidikan yang hampir sama dengan Amerika maupun negara Eropa Barat. Saat

ini, pemerintah Polandia telah memberikan 26 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia dan diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan minat pelajar Indonesia.

Sementara itu, terkait bidang pelayanan kesehatan, Ketua Grup Kerja Sama Bilateral Indonesia-Polandia Imam Suroso mengatakan, Polandia dapat menjadi negara percontohan. “Seperti sistem BPJS di sana, nanti kita akan lihat apakah ada yang bisa efektif dan efisien tapi masyarakat tetap tercover. Jika cocok maka bisa kita tiru dan modifikasi,” paparnya.

Ia menambahkan, nantinya kunjungan delegasi GKSB akan diterima langsung oleh Parlemen Polandia, Menteri Pendidikan dan Sains, Menteri Pertahanan dan akan ada kunjungan spesifik ke pabrik bus listrik Polandia. ■

(am/sc)/iw, Foto: Arief



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Anggota DPR Imam Suroso, memberi cenderamata kepada Duta Besar Polandia, Igor Kaczmarczyk di Gedung DPR RI, Senin (6/11).



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama beberapa Anggota DPR lainnya mengunjungi Kongres Amerika Serikat di Washington DC, (1-3/11).

## DPR Tindaklanjuti Kerja Sama dengan Kongres Amerika

Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menindaklanjuti kerja sama penguatan DPR dengan Kongres AS. Layaknya AS yang sudah menjalankan demokrasi dengan mapan, DPR ditargetkan mampu menjadi pengawas pemerintah yang semakin kuat dan profesional.

“Amerika ini sudah jelas kalau parlemennya adalah daulat rakyat, jadi betul-betul kuat dan rakyatnya tahu bahwa DPR itu kuat dan dia bisa diandalkan. Sedangkan di negeri kita, kan, enggak ada tradisi parlemen kuat itu. Dulu pernah ada sistem parlementer tapi pemerintah sering jatuh karena parlemennya berantem terus. Sehingga akhirnya rakyat jadi sinis dengan tradisi

parlemen itu,” papar Fahri dalam rilis yang diterima *Parlementaria*, Jumat (03/11)

Sebagai pemimpin tim reformasi parlemen yang ingin membangun citra baru di Senayan, Fahri harap rakyat betul-betul melihat DPR sebagai pemegang amanah rakyat. Sehingga, DPR pun dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga pengawas terhadap kebijakan pemerintah. Hal inilah, lanjut

Fahri, yang ingin didalami dari DPR Amerika.

“Di sini konstitusinya mengatakan bahwa APBN itu punya rakyat, karena itu yang pegang DPR. Pemerintah datang minta sekian dikasih sekian. Ditanya dulu untuk apa itu, enggak dikasih sudah tutup pemerintahannya, ya kan. Di sini ada namanya government shutdown, kalau parlemen bersepakat pemerintahannya jangan dikasih uang, seluruh kantor pemerintah tutup, pegawainya berhenti bekerja. Kalau kita, kan, masih nyengir pakai APBN tahun yang lalu. Ini bedanya tapi kita harus membangun parlemen yang betul-betul independen di masa yang akan datang,” tegasnya.

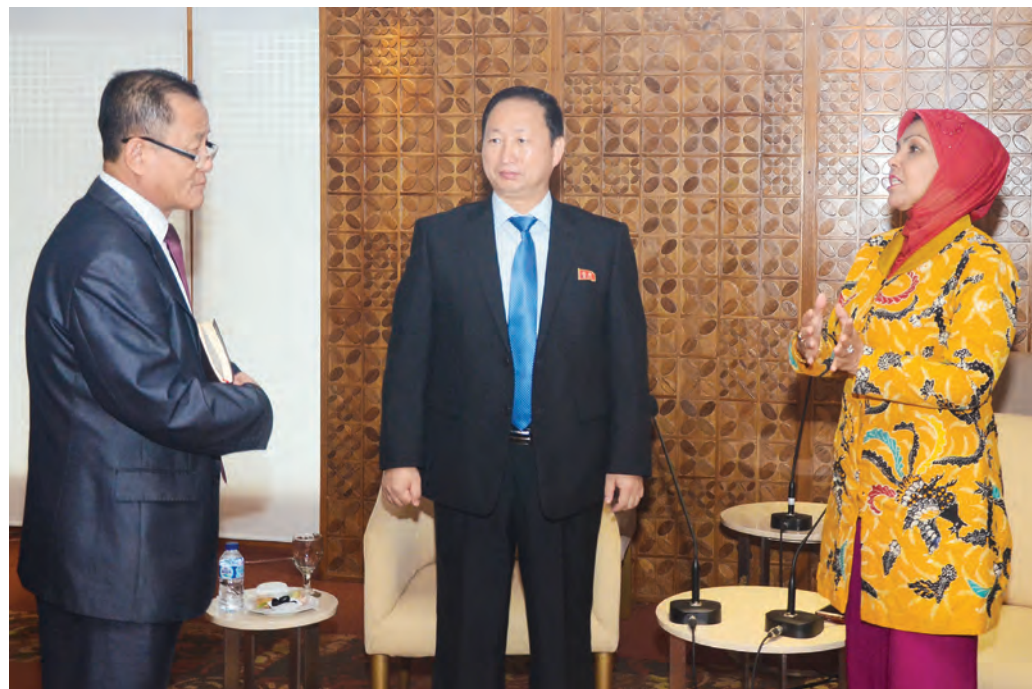
Selain bertemu dengan lembaga pengelola Kongres Amerika, Rombongan juga bertemu dengan Ketua House Democratic Partnership dan USINDO. Kepada USINDO, Fahri meminta agar membantu secara lebih teknis penguatan kelembagaan DPR khususnya staf pendukung. ■

(am/imp).Foto: dok



# Indonesia Konsisten Menjaga Perdamaian Dunia

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, Indonesia sebagai negara yang berdaulat akan terus mempertahankan konsistensinya untuk menjaga perdamaian dunia.



Ketua BKSAP DPR, Nurhayati Ali Assegaf menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Korea Utara, An Kwang Il di Gedung DPR RI, Kamis (2/11).

Demikian mengemuka dalam Courtesy Call BKSAP dengan Duta Besar Republik Demokratik Korea Utara untuk Indonesia, An Kwang Il dan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaib di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (02/11/2017).

Kepada An Kwang Il, politisi Demokrat ini mengatakan, menegangnya hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat dapat menyebabkan perang, sehingga ia meminta Korea Utara untuk memanfaatkan hubungan baik yang telah terjalin dengan Indonesia.

Menurutnya, Indonesia dalam menjalankan diplomasi parlemennya bisa menjadi mediator kedua negara agar tercipta suasana yang kondusif serta mencairkan hubungan yang selama ini menegang. "Kita melihat Korea Utara

bukanlah sebagai sebuah masalah, tetapi negara tetangga yang baik untuk kita kembangkan," ujar Nurhayati kepada An Kwang Il.

Menanggapi hal itu, An Kwang Il memberikan apresiasinya kepada Indonesia, yang mengambil sikap netral dan tidak terpancing situasi panas antara Korut dan Amerika. Ia juga menyinggung perkembangan situasi di semenanjung Korea, sejak pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terang-terangan ingin menghancurkan Korut dan Iran dalam pidatonya di Sidang PBB.

"Perkataan ini tidak pernah terjadi oleh Presiden Amerika sebelumnya. Sekarang Amerika sedang mempermasalahkan kebijakan bela diri sebagai ancaman terhadap keamanan dunia. Dengan mempermasalahkan itu, mereka (AS)

memasok aset nuklir ke Korsel dan melakukan latihan militer gabungan," ungkap An Kwang Il.

Di samping itu, lanjutnya, AS juga melakukan sanksi ekonomi terhadap Korut dengan memaksa negara lain untuk memutuskan hubungan bilateralnya dengan Korut. Menurutnya, walaupun AS memberikan banyak tekanan, tapi Indonesia sebagai negara berdaulat dan pencetus gerakan non-blok tidak goyah oleh tekanan Amerika dan tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan Korut. Hal ini terbukti dengan sikap Indonesia yang menolak isu emergency item test nuklir Korea yang diajukan Parlemen Jepang dan Meksiko dalam Sidang IPU.

"Pemerintah dan parlemen kami, sangat berterima kasih terhadap Indonesia dan kami terus bertekad memajukan hubungan baik dengan Indonesia. Saya juga berharap, hubungan antar kedua parlemen terus dilanjutkan dan ke depan saling mengunjungi antarkedua parlemen kita," tandas An Kwang Il, yang ditutup dengan pertukaran cenderamata.

Hal yang sama juga mengemuka dalam pertemuan BKSAP dan Dubes Arab Saudi Osama

bin Mohammed Abdullah Al Shuaib. Kedua belah pihak membahas peningkatan hubungan baik antara kedua parlemen.

Dengan kedekatan emosional yang dimiliki antara Indonesia-Arab Saudi, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga perdamaian di kawasan masing-masing. Nurhayati mengungkapkan keprihatinan atas konflik negara-negara di semenanjung teluk. Ia berharap, hubungan semua negara berjalan dengan baik.

"Indonesia memiliki kedekatan emosional dengan negara-negara di semenanjung teluk, dimana mayoritas penduduknya muslim. Dalam ajaran Islam, sesama pemeluk Islam adalah saudara. Ini yang membuat kita ingin di seluruh kawasan menjaga ketenangan dan berbagi kesejahteraan," tutup politisi asal dapil Jawa Timur itu. ■

(annist/sc)/iiv. Foto: Jayadi



Tim Kunker Komisi V DPR mengunjungi pelebaran jalan lintas Kota Jambi-Mendalo (31/10).

## Pelebaran Jalan Lintas Kota Jambi-Mendalo Mendesak Dilakukan

Jalan utama dari Kota Jambi menuju Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi merupakan jalur terpadat di Jambi. Akses jalan tersebut terlalu sempit. Padahal, ini menjadi satu-satunya jalan menuju dua kampus besar dan juga lintasan utama kendaraan antarprovinsi maupun kendaraan pengangkut barang. Pelebaran jalan pun jadi kebutuhan mendesak

**H**al ini terungkap saat Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mengunjungi akses jalan lintas Kota Jambi-Mendalo di Muaro Jambi, Selasa (31/10/2017). Kondisi jalan tersebut sangat sempit, sehingga membuat lintasan jalan rawan kecelakaan. Pemerintah, terutama Pemerintah Provinsi

Jambi didesak agar melakukan pelebaran jalan tersebut.

Kebutuhan jalan menjadi kebutuhan pokok dalam pembangunan daerah, karena jalan merupakan akses utama jalannya roda ekonomi daerah. Oleh karena itu, pembangunan jalan di daerah sangat penting dan harus menjadi skala

prioritas. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo yang memimpin Tim Kunker ini meninjau langsung proyek pembangunan dan pelebaran jalan utama di Kota Jambi.

Politisi PKS ini, menyerukan, pembebasan lahan, izin amdal, dan persyaratan lainnya harus segera diselesaikan sebelum proyek pembangunan dan perluasan jalan tersebut dilaksanakan. Selain itu, dia juga meminta agar Pemda secara intensif berkomunikasi dengan pusat terutama dalam dukungan anggaran.

“Kami Komisi V tentunya juga akan membantu memperjuangkan agar pembangunan infrastruktur jalan di Jambi mendapat alokasi anggaran dari APBN,” ungkapnya. Dia juga meminta agar terjalin kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Jambi ada dua wakil yang akan terus menyuarakan dan memperjuangkan di pusat.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Bakri menyampaikan bahwa jalan lintas Kota Jambi-Mendalo sangat mendesak untuk dilakukan pelebaran. Kehadiran Komisi V kali ini akan memperkuat Jambi dalam pengajuan pelebaran jalan tersebut ke pemerintah pusat. “Dengan hadirnya teman-teman Komisi V DPR ke Jambi, bisa membantu menjelaskan betapa butuhnya jalan tersebut kepada pemerintah pusat,” ungkapnya.

Di sisi lain, Bupati Muaro Jambi Masnah Busro berharap kunjungan Komisi V DPR ke lokasi rencana pelebaran jalan lintas Kota Jambi-Mendalo, bisa membantu merealisasikannya terutama bantuan untuk memperjuangkan anggaran pusat. ■

(skr), Foto: Singgih



Anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari saat melakukan kunjungan kerja ke Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (30/10).

## Komisi VIII Usul Bangun Save House di Tarakan

Anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari menyatakan Kota Tarakan, Kalimantan Utara, memerlukan rumah aman bagi korban kekerasan perempuan dan anak yang disebut save house atau shelter. Ia minta Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti hal ini.

“Di Kota Tarakan belum ada rumah aman bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Ini menjadi perhatian kita untuk ditindaklanjuti

ke Kementerian Sosial. Yang lebih utama lagi yang membangun adalah Pemerintah Daerah, yaitu gubernur atau wali kotanya,” tegasnya saat Tim Komisi VIII melakukan





pertemuan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tarakan, Senin (30/10/2017).

Meski jumlah kasus KDRT perempuan dan anak menurun tiap tahunnya, namun lanjut politisi PAN ini, dikuatirkan hal ini bukan karena jumlahnya yang turun,

melainkan banyak yang tidak melaporkan pada dinas yang terkait.

Menurut Staf Analisis Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Tarakan Siti Hadijah, kendala terbesar pada perlindungan perempuan dan anak saat

ini adalah tidak adanya tempat rehabilitasi. "Hampir setiap hari kita menangani kasus KDRT maupun pelecehan seksual, begitu pula dengan anak di bawah umur 17 tahun itu juga ada beberapa kasus lainnya. Semuanya lengkap mulai dari kronologis, data korban, pelaku, dan penanganannya," kata Siti. ■

(hr/sc)/iw.

## Kinerja Kejaksaan Tinggi Kalbar Jadi Sorotan Komisi III

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat Benny Kabur Harman minta Pemerintah Pusat lebih memperhatikan proses penanganan korupsi yang berpusat di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat yang membutuhkan biaya ekstra.

**H**al itu dikemukakan usai melakukan pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat Sugiyono beserta jajarannya di Ruang Pertemuan Kajati Kalbar, Senin (30/10/17).

Menurut Benny, pertemuan yang dilakukan bersama Kajati Provinsi Kalbar adalah untuk mengetahui lebih jauh hal-hal yang berkenaan dengan agenda reformasi ke dalam, berkenaan dengan pelaksanaan BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan saber pungli.

"Sejauh mana itu dilaksanakan di sini, karena itulah salah satu agenda reformasi penegakan hukum yang dicanangkan Bapak Presiden. Kita ingin tahu seperti apa Kejaksaan Tinggi di Kalbar. Kita ingin tahu juga reformasi internal Kejaksaan seperti apa, penanganan kasus korupsi, dan penanganan dana desa di sini seperti apa. Kemudian juga kasus-kasus narkoba seperti apa," papar Benny.

Menurut Benny, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar menyampaikan kasus-kasus yang ditangani juga kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus ini yaitu salah satunya masalah dana. Kemudian Penanganan kasus

korupsi yang berpusat di ibu kota provinsi itu menyulitkan penanganan korupsi di sini, karena dari kabupaten, kan, harus dibawa ke provinsi dengan akses jalan yang begitu sulit sehingga memerlukan biaya ekstra. Dan Kepala Kajati Kalbar meminta perhatian Pemerintah Pusat.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai, kinerja Kajati Provinsi Kalbar tidak jauh berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya, namun demikian dirinya cukup mengapresiasi jumlah perkara yang ditangani dan juga cukup banyaknya keuangan negara yang dikembalikan secara cukup signifikan hingga Rp 8 miliar dalam satu tahun terakhir.

"Itu tidak kecil untuk tingkat provinsi seperti ini. Jumlah kasusnya pun tidak satuan tapi sudah puluhan, jadi sudah cukup baik. Saya rasa secara umum sama seperti Kejaksaan Tinggi yang lain," kata Agun.

Menurut hematnya, ke depan yang harus dilakukan bagaimana mensinergikan proses keuangan negara yang membawa dampak kerugian negara, karena penyalahgunaan keuangan. Ia meminta Kejaksaan untuk tampil menggunakan segala otoritas

dan kewenangan dengan segala perangkatnya untuk mencegah dini. Seperti contohnya anggaran dana desa.

Dijelaskan Agun, dana desa berpotensi besar disalahgunakan, karena aparatur desa tidak punya pengalaman yang cukup dan tidak mempunyai pengetahuan yang memadai dalam penggunaan keuangan negara. Mekanisme pengaturannya perlu langkah-langkah sinergis antara kementerian yang satu dengan yang lain.

"Nah potensi maladministrasi ini besar. Kalau menurut hemat kami, Kejaksaan Tinggi harusnya sudah punya langkah-langkah antisipatif bersama gubernur, sejumlah pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, dan anak muda. Kalau perlu dilibatkan untuk betul-betul membuka secara jelas bagaimana prosedur, mekanisme, pengawasan, dan pemanfaatan dana desa dari masing-masing desa. Dan itu dipublikasikan luas sehingga tidak boleh ada politisasi dalam penegakan hukum dana desa," tutup politisi Partai Golkar ini.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Sugiyono berharap apa yang sudah disampaikan kepada Komisi III DPR dapat diakomodir khususnya mengenai anggaran.

"Setidak-tidaknya bisa disamakan (ad cost), sehingga tidak mendapat kesulitan. Karena sekarang ini Kejaksaan Tinggi hanya didanai 3 Perkara, Kejari 1 Perkara. Lah, bagaimana kalau melaksanakan penyidikan lebih dari itu, nanti yang ada hanya terus menduga duga, uangnya darimana," pungkas Sugiyono. ■

(ndy/sc)/iw. Foto: Nadya



Ketua Tim Kunker Komisi III DPR, Benny Kabur Harman saat menggelar pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Senin (30/10).



Tim Kunker Komisi III DPR meninjau Lapas Kelas II A Teluk Dalam, Banjarmasin (30/10).

## Over Kapasitas Lapas Banjarmasin Sudah Meresahkan

Over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah meresahkan. Para narapidana yang ditempatkan di Lapas ini terus bertambah, Bukan berkurang. Apalagi yang bertambah adalah narapidana kasus narkoba. Ada yang salah dari penanganan tindak pidana narkoba. Aksi pencegahan dinilai masih kurang.

**W**akil Ketua Komisi III DPR RI Desmon Mahesa menyatakan hal tersebut usai menggelar pertemuan dengan Kakanwil Kemenkum HAM di Lapas Kelas IIA Teluk Dalam, Banjarmasin, Kalsel, Senin (30/10/2017). “Kami ingin melihat apakah ada perubahan over capacity. Semakin baik atau tidak semakin baik. Realisasinya ternyata jumlah orang selalu bertambah.”

Bila tahanan kasus narkoba terus bertambah di Lapas ini, berarti ada yang salah dari penanganan narkoba. BNN sebagai institusi yang punya

otoritas menanganinya perlu merubah cara penidakkannya. Kampanye pencegahan perlu diperluas dengan gerakan yang masif. “Ada suatu pertanyaan besar dari kami Komisi III menyangkut hal ini. Nanti kita akan ketemu dengan Kapolda dan BNN,” ucap politisi Partai Gerindra itu.

Over kapasitas selalu menjadi masalah di hampir semua Lapas di Indonesia. Untuk itu, sambung Desmon, perlu ada kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dan ada pula kebijakan di tingkat daerah. Dengan kunjungan Komisi III ini, tentu ada kroscek sekaligus melihat dari dekat bagaimana kondisi Lapas selama ini. Kasus narkoba masih mendominasi

penghuni Lapas. Bahkan, ada narkoba masuk ke Lapas. Ini tentu menyangkut penjagaan yang lemah.

“Penegakan hukum tanpa pencegahan adalah omong kosong,” ucap Desmon lagi kepada para wartawan. Persoalan klasik Lapas tentang over kapasitas, perlu pula dikoordinasikan dengan penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan, kepolisian, dan peradilan. Bila sumber pasokan narkoba bukan di Banjarmasin, berarti ada penjagaan yang lemah di pelabuhan dan bandara. Dengan penjagaan yang baik di pintu masuk, pencegahan pun bisa lebih efektif. ■

(rief), Foto: Arief



# Bulog Kalbar Lebih Banyak Serap Beras dari Provinsi Jawa Barat

Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Nasyid Umar mengapresiasi langkah Bulog Divre Kalimantan Barat yang lebih memilih menyerap beras dari daerah lain. Mengingat harga jual petani lokal ke pasaran lebih tinggi dibanding harga beli yang ditawarkan Bulog.

“Saya mengapresiasi langkah Bulog Divre Kalbar ini yang lebih banyak menyerap beras atau gabah dari provinsi lain seperti Jawa Barat. Pasalnya, harga jual beras dari petani lokal (petani Kalbar) ke pasaran jauh lebih tinggi dibanding harga yang mampu dibeli Bulog. Jadi tentu akan lebih menguntungkan petani jika menjual ke pasaran dibanding ke Bulog,” papar Nasyid, Sabtu (29/10/2017).

Ditambahkan politisi Fraksi Partai Demokrat ini, selama petani sejahtera maka hal tersebut tidak masalah. Karena

Bulog pun bisa menyerap beras dari provinsi lain dengan harga yang sesuai dengan anggaran yang ditetapkan pemerintah. Dengan kata lain Bulog Divre Kalbar pun masih tetap memiliki cadangan beras dari daerah lain yang sewaktu-waktu bisa didistribusikan ketika musim kering atau paceklik.

Sementara itu Direktur Keuangan Bulog Iryanto Hutagaol menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan harga pembelian beras oleh Bulog dari petani sebesar Rp 7.300 per kilogramnya. Namun harga jual beras dari petani di

Kalbar ke pasaran sebesar Rp 8.300- Rp 8.400 per kilogramnya. Karena tidak sesuai dengan anggaran, maka pihaknya lebih memilih menyerap atau membeli beras dari provinsi lain dengan harga yang sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

“Untuk beras petani lokal (Kalbar) kami hanya mampu menyerap sekitar 800 ton, sisanya sebanyak 9000 ton lebih kami ambil dari Provinsi Jawa Barat dengan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah, yakni Rp 7.300 per kilogramnya. Ditambah ongkos transportasi tetap masih lebih rendah dibanding kita beli beras dari petani lokal. Kami tidak masalah karena petani juga sudah cukup sejahtera dengan menjual ke pasaran yang harganya lebih tinggi,” papar Iryanto. ■

(ayu/sc), Foto: Ayu



Tim Kunker Komisi IV DPR meninjau ketersediaan stok beras di Bulog Divre Kalimantan Barat (29/10).

# Luas Lahan Jadi Kendala Peningkatan Produksi Garam



Ketua Tim Kunker Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi menambak garam di PT Garam di Desa Bipolo, Kupang, NTT (29/10).



Komisi IV DPR RI menemukan masalah lahan yang masih jadi kendala peningkatan produksi garam di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal tersebut menyebabkan sampai saat ini Indonesia masih melakukan impor garam. Padahal, Indonesia memiliki kualitas garam yang baik.

“Kendalanya yaitu soal luas lahan. Ada beberapa lahan potensial di NTT, tetapi peruntukannya bukan untuk lahan garam.

Ada lahan milik swasta, tetapi tidak dijadikan apa-apa, sehingga lahan mati dan menjadi tidak produktif,” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi usai melakukan pertemuan dengan Direksi dan jajaran PT. Garam di Desa Bipolo, Kupang, NTT, Minggu (29/10/2017).

Hal-hal seperti itu, menurut Viva, harus menjadi kajian pemerintah. Wakil Ketua Komisi IV ini menyatakan, ketika ada lahan potensial yang bisa digunakan untuk lahan garam, baik itu milik rakyat atau milik swasta, lebih baik melakukan kerja sama untuk perluasan lahan agar produksi garam bisa meningkat.

Lebih lanjut, Viva menjelaskan ada tiga hal penting yang harus dilakukan untuk peningkatan produksi garam. Tiga hal tersebut yaitu, pertama, petani garam harus mau diintegrasikan menjadi satu. Kedua, pemerintah harus melakukan mitra dengan petani tambak garam untuk meningkatkan kualitas dan kuota produksi. Dan ketiga, penerapan teknologi baru untuk efisiensi dan efektifitas. “Intinya bahwa kita sangat optimis Indonesia 2020 bisa swasembada garam,” tegasnya.

Garam di Desa Bipolo, Kupang, NTT, merupakan salah satu sumber garam baru yang dikelola oleh PT. Garam bersama dengan petani tambak garam, dalam rangka meningkatkan produksi garam nasional. Selama ini, produksi garam hanya terpaku di Pulau Madura.

Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Kehutanan dan Perikanan RI dalam melakukan ekspansi ke beberapa daerah di luar Pulau Madura, seperti di Probolinggo dan NTT.

Produk garam Indonesia sendiri juga tidak kalah dengan garam impor dan sudah memenuhi standar nasional untuk bisa diproduksi. “Ini menjadi harapan yang sangat bagus bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Jika luas lahan panen di beberapa daerah NTT ditingkatkan dan dikembangkan lagi, saya optimis tahun 2020 Indonesia sudah tidak akan impor garam lagi, baik garam industri maupun garam konsumsi,” papar polisi PAN tersebut. ■

(ica/sc), Foto: Larissa

# LIPI Ambon Kurang Optimal Lakukan Penelitian Laut Dalam



Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meninjau kapal laut milik Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) Regional Maluku yang sudah tidak berfungsi kembali, Selasa (31/10).

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wilayah Ambon dinilai kurang optimal melakukan penelitian terhadap laut dalam. Ini disebabkan, minimnya fasilitas pendukung sehingga aktivitas penelitian terbatas.

**D**emikian terungkap saat delegasi kunjungan kerja Komisi VII berkunjung ke Kota Ambon, Maluku, Selasa (1/11/2017). Anggota Komisi VII Bara Hasibun yang ikut dalam rombongan kunker ini, menyampaikan, akan memberi dukungan fasilitas baru untuk penelitian laut dalam, "Kami mendukung dengan adanya fasilitas baru seperti kapal untuk LIPI yang ada di kota Ambon. Ini untuk memajukan penelitian laut dalam," cetusnya.

Salah satu yang menjadi perhatian

Komisi VII adalah kapal riset Baruna Jaya VII yang dimiliki LIPI. Kapal ini digunakan untuk melakukan riset di wilayah perairan dengan kedalaman 1000 meter di bawah permukaan laut. Namun, kapal yang berusia 17 tahun tersebut sudah tidak optimal lagi untuk digunakan penelitian di perairan Indonesia bagian timur, khususnya Maluku.

Kepala Biro Perencanaan LIPI Maluku Zarnal Arifin, mengungkapkan, kondisi mesin kapal Baruna Jaya VII semakin tua, sehingga tidak efisien dan boros bahan

bakar. Selain itu juga beberapa perangkat kapalnya sulit ditemukan karena tidak dijual lagi. "Spare parts-nya sudah tidak dijual lagi, sehingga kami cukup sulit untuk mengganti part yang sudah rusak," aku Zaenal.

Dengan melihat karakteristik Provinsi Maluku yang memiliki 98% lautan dan 2% daratan ini, Komisi VII akan menanggapi serius permintaan fasilitas baru untuk LIPI Ambon. Jadi, nanti wilayah Indonesia Timur dapat menjadi pusat penelitian laut dalam dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

"Kita ingin kawasan Indonesia Timur itu dipakai sebagai pusat untuk penelitian laut dalam. Hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan potensi laut kita yang sesuai dengan karakteristik Maluku. Maka dari itu, kami segera menindaklanjuti permintaan fasilitas baru seperti kapal demi kemajuan penelitian," sambut Bara.

Dengan adanya kapal baru nanti, politisi PAN itu, berharap LIPI akan menjadi lembaga penelitian yang selalu berinovasi bagi Indonesia dan manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat banyak. Selain itu, dirinya juga berharap penelitian itu akan terus dilakukan oleh seluruh daerah sesuai karakteristik wilayahnya.

Contohnya, sambung Bara, wilayah Jawa untuk penelitian pertanian, wilayah Kalimantan untuk sumber daya mineral, dan Maluku untuk perikanan, sehingga berdampak positif untuk warga sekitar dan umumnya masyarakat Indonesia. ■

(jay) foto: jayadi

## BLK di Nias Belum Bisa Difungsikan



Anggota Komisi IX DPR RI Ayub Khan saat mengikuti kunjungan kerja ke Balai Latihan Kerja (BLK) Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Jumat (27/10).

Anggota Komisi IX DPR RI Ayub Khan menyatakan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kepulauan Nias, Sumatera Utara yang dibangun sejak tahun 2010 dan selesai tahun 2011 belum bisa dioperasikan karena belum dilengkapi peralatan kerja yang memadai.

**“**Bangunan BLK usulan Nias Selatan itu terletak di wilayah Nias Utara, jadi itu mungkin salah satu kendalanya. Membangun BLK bisa dilakukan pemerintah daerah setempat yang direncanakan oleh pemerintah provinsi kemudian nantinya akan didukung oleh

pemerintah pusat baik program maupun alat-alatnya,” paparnya di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kepulauan Nias, Jumat (27/10/2017)

Politisi F-Demokrat ini menjelaskan sampai saat ini BLK Kepulauan Nias belum bisa beroperasi karena tidak adanya alat-



# Banyak Persoalan di BLK Pontianak

Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz menilai BLK (Badan Latihan Kerja) Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak banyak mengalami persoalan yang perlu direvitalisasi di beberapa faktor, seperti sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), dan menurunnya alokasi APBN untuk kegiatan BLK

3 milyar sekarang menjadi hanya Rp 400 juta dan dukungan dari APBD Rp 500 juta. Ini harus menjadi perhatian semua pihak yang terkait,” ujar politisi F-PPP dapil Banten III kepada Parlemenaria usai meninjau BLK di Pontianak, Jumat (27/10/2017).

Lebih lanjut Anggota Komisi IX DPR ini meminta kepada Kementerian Ketengakerjaan dan Pemerintah Daerah agar memikirkan bagaimana kelanjutan BLK ini. Karena kalau terus menerus dibiarkan maka akan tergerus, sehingga tidak bisa bekerja secara maksimal.

Irgan juga menyayangkan sekali dengan sarana dan prasarana yang ada saat ini dan masih berjalan seperti otomotif. Menurutnya, jika tidak dimaksimalkan dengan benar hanya akan menjadi sia-sia. Oleh karenanya, kepada seluruh pihak yang terkait agar bisa berpikir bagaimana BLK ini bisa lebih aktif lagi dengan kejuruan-kejuruan yang dioptimalkan sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat.

“Di sini ada beberapa kejuruan yang memang diminati seperti tata rias, menjahit, operator, dan otomotif. Fokuskan saja ke kejuruan yang masih banyak peminatnya jika memang kejuruan lain tidak begitu diminati agar dialihkan ke kegiatan yang masih diminati,” ungkapnya

Politisi F-PPP itu juga melihat bahwa ada beberapa komponen alat yang sudah tidak layak dan tidak perlu dipakai lagi, seperti peralatan elektronik dari tahun 80-an. “Saya kira sudah tidak layak lagi untuk sekarang ini, karena sekarang, kan, teknologi sudah jauh lebih canggih daripada dahulu dan alat-alat kejuruan lainnya untuk bisa memperlancar kegiatan,” menurutnya.

IajugaberharapagarBLKmempunyai inisiasi untuk menggandeng pihak-pihak lain agar bisa mengikutsertakan para calon tenaga kerjanya mengikuti pelatihan di BLK. “BLK ini, kan, berbasis kompetensi mereka meng-upgrade kemampuan para pekerja untuk bisa mempunyai keterampilan agar setelah keluar dari BLK mereka bisa bekerja dengan baik dan juga bisa membuka wirausaha dengan baik,” tuturnya. ■



Tim Kunjungan Kerja Komisi IX meninjau Balai Latihan Kerja (BLK) Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (27/10).

“Persoalan sarpras dan SDM persoalannya cukup kompleks. Sebagai contoh, semula instruktur berjumlah 39 kini hanya tersisa 18

dan bisa saja tahun depan turun lagi karena paket kegiatan yang sangat minim. Alokasi APBN pun menurun yang semula di tahun sebelumnya sekitar Rp

alat pelatihan, tenaga instruktur, dan tenaga administrasi.

“Kalau mau dioperasikan, tentu perlu kejelasan status sehingga jelas pertanggungjawaban operasionalisasinya. Sayang sekali bangunan besar yang didirikan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) itu tidak difungsikan dengan baik,” lanjutnya.

Di sisi lain, politisi Demokrat ini menyoroti masalah Program Nusantara Sehat di Nias yang tidak berjalan dengan baik. Menurut Ayub, seharusnya pemerintah daerah proaktif untuk mengusulkan, sehingga pemerintah pusat bisa mengalokasikan ke Nias Selatan,

Nias Utara, dan lain sebagainya. Selain itu, hampir separuh dari Puskesmas di Nias, lanjutnya, tidak ada tenaga medisnya

“Dari hasil reses hari ini akan kami sikapi juga kemudian segera kami rapatkan di Komisi IX dengan mitra kerja terkait agar semua berjalan dengan lancar. Kehadiran Komisi IX DPR RI ini untuk berdiskusi dengan pengambil keputusan supaya bisa mengatasi segala persoalan yang lebih prioritas. Yang jangka pendek dikerjakan dan yang jangka panjang diagendakan. Dengan begini bisa teratasi sedikit demi sedikit,” jelasnya. ■

(c)has/scj/iv, Foto: Chastri

(azka/sc), Foto: Azka



Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Tol Manado-Bitung (27/10).

## Tol Manado-Bitung Terancam Gagal Selesai 2019

Tol Manado-Bitung adalah bagian Proyek Strategis Nasional dengan total panjang jalan 39 kilometer. Pembangunan jalan tol yang diharapkan bisa meningkatkan konektivitas dari Kota Manado ke Pelabuhan Internasional Bitung itu direncanakan selesai pada Februari 2019. Namun, bila pembebasan lahan tidak berjalan lancar, bisa menghambat target proyek jalan tersebut.

**W**akil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengemukakan hal itu saat meninjau proyek jalan tol Manado-Bitung, Jumat (27/10/2017). "Meskipun proses pembebasan lahan cukup bagus, target pembangunan tol tidak akan tercapai, jika masalah pembebasan lahan tidak segera dikejar dan diatasi. Di titik-titik yang belum bisa dibebaskan justru masalah agak rumit, karena lambannya proses hukum di Mahkamah Agung," jelas Lasarus.

Kondisi lambannya pembebasan lahan diakui pula oleh Dirut PT. Jasa Marga





# Pemerintah Belum Pastikan Kelanjutan Pembangunan Jalan Pantura Flores

Rencananya pembangunan jalan pantai utara (Pantura) di Pulau Flores akan dianggarkan pada RAPBN 2018. Penganggaran ini untuk melanjutkan pekerjaan ruas jalan setempat dan akan dibahas bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

Manado-Bitung George IMP Manurung di depan Tim Kunker Komisi V DPR RI. Katanya, kendala yang sangat krusial ditemui di lapangan adalah pembebasan lahan dan terlalu lambanya dana pinjaman (loan) dari China. George menjelaskan, pembebasan lahan yang rumit terjadi di Bitung, karena akan banyak rumah yang tergusur dan perlu pendekatan yang tidak mudah untuk ganti rugi lahannya.

Di titik tertentu, sambung George, kendaraan proyek malah tidak boleh melintas, karena lahan belum dibebaskan. Akhirnya kendaran proyek harus keluar jalur dan mengerjakan di lokasi yang sudah dibebaskan dahulu. Ini sangat mengganggu kelancaran pembangunan proyek. Merespon hal ini, Lasarus sebagai ketua Tim Kunker, berharap agar Pemda dan dinas terkait pro aktif membantu membebaskan lahan hingga ke kabupaten-kabupaten yang dilewati proyek tol Manado-Bitung.

Pembangunan Tol Manado-Bitung ini, sambung Lasarus, akan dibahas secara khusus di Komisi V dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mencapai titik temu agar pembangunan tol ini bisa selesai sesuai target yang disepakati bersama pemerintah. Sementara di tempat berbeda, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey juga mengakui bahwa masalah utama adalah pembebasan lahan. Menurut

Olly, pembebasan lahan kurang memperhitungkan fungsi lahan.

Namun demikian Olly optimis masyarakat masih bisa kooperatif jika ada komunikasi yang baik. "Memang ada kendala dalam penyelesaian pembebasan lahan. Namun, kami berharap masyarakat pemilik tanah bisa mengikhlaskan tanahnya untuk digunakan bagi kepentingan umum dalam pembangunan jalan tol ini. Tentu masyarakat akan mendapat ganti rugi yang wajar berdasarkan penilaian tim penilai independen," jelasnya. ■



Tim Kunker Komisi V DPR saat berkunjung ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, NTT (27/10).

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin saat memimpin tim kunjungan kerja (Kunker) Komisi V ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Mata anggaran untuk pengerjaan ruas jalan ini tidak dicoret. Tinggal menunggu hasil pembahasannya di Komisi V. Hal ini disampaikan Muhidin di hadapan para wartawan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Sabtu (21/10/2017).

"Anggaran untuk Bina Marga di Kementerian PU sudah diketuk palu, tetapi RKA-K/L sementara diproses untuk menentukan mana yang diberikan sebagai prioritas utama dan mana yang tidak. Kalau yang sudah dikerjakan sebelumnya tetap dilanjutkan. Yang bisa kami tentukan adalah besaran anggaran untuk seluruh Bina Marga," ujar Anggota F-PG ini.

Muhidin menjelaskan, dalam ketentuan UU tentang APBN, satu bulan setelah diketuk palu, baru pihak kementerian melakukan pembahasan detail berkaitan dengan pekerjaan mana yang akan dilaksanakan dan mana yang tidak.

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) X Kupang Hardianus Bambang Nurhadi mengatakan, belum bisa memastikan apakah pekerjaan ruas jalan lintas utara Flores itu bisa dilanjutkan atau tidak pada 2018 mendatang.

"Untuk Tahun Anggaran 2018 masih menunggu hasil ketuk palu RKA-K/L yang sedang diproses. Kami tetap konsentrasi di Labuan Bajo karena di sini termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai tujuan wisata. Ini juga prioritas strategis nasional. Kami upayakan agar alokasi tetap kami tangani," kata Bambang.

Ia juga membenarkan apa yang disampaikan Muhidin sebelumnya bahwa anggaran tidak dicoret, tetapi penggunaan anggarannya sedang dibahas untuk menentukan skala prioritas. Bambang mengaku, kini sedang fokus menangani sejumlah titik rawan longsor pada ruas jalan nasional Ruteng-Labuan Bajo. Ruang itu, lanjutnya, menjadi jalur utama distribusi logistik dari Pelabuhan Reo ke Ruteng dan Labuan Bajo. ■

(do) foto: dceh

(w/sc)/iw. Foto: Iwan

# 2018 Seluruh Desa di Aceh Harus Teraliri Listrik

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali mengharuskan kepada PLN Nangro Aceh Darussalam (NAD) agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan listrik di setiap desa yang ada di NAD. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat melakukan Kunjungan Kerja ke NAD.



Tim Kunker Komisi VII mengunjungi PLN Nangro Aceh Darussalam (31/10).

**K**etersediaan energi listrik yang cukup, kini menjadi satu persoalan penting di Aceh. Kebijakan pemadaman bergilir oleh pemegang mandat listrik, Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih terjadi. Syaikhul menegaskan, keharusan penyediaan listrik di setiap desa di Aceh tidak bisa ditawar lagi.

“Harus bisa dilaksanakan, saya kira untuk Aceh ini sangat mudah ya, karena hanya 12 desa. Jadi, mungkin intervensinya tidak terlalu sulit,” tandasnya di Kantor PLN perwakilan Aceh, Selasa (31/10/2017) sore.

Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta percepatan elektrifikasi listrik desa di seluruh Aceh. Tidak hanya itu dia juga mendorong PLN agar dapat mengatasi masalah kelistrikan yang ada di Sumatera.

“Kami juga mendesak kepada Direktur Bisnis Wilayah Sumatera untuk menyampaikan pemetaan masalah dan solusinya seperti apa. Jadi, saya mohon untuk Sumatera tidak ada desa yang tidak berlistrik,” jelasnya.

Meskipun demikian, anggota dewan dari Dapil Jawa Timur ini menilai, kinerja

PLN di Aceh sudah bagus. “Saya kira sudah bagus ya. Aceh ini peringkat kedua di Sumatera untuk rasio elektrifikasi, khususnya untuk elektrifikasi berbasis desa, hanya di bawah Bangka Belitung. Jadi, 12desa ini pun harus diselesaikan,” pungkasnya.

Syaikhul menyampaikan, ketersediaan energi nasional adalah tugas negara maka dalam hal ini dia mengatakan dengan tegas, tidak boleh ada satu rumah pun, satu warga negara pun yang tidak mendapatkan listrik. Karena dalam hal energi juga harus ada keadilan sosial, sesuai dengan Pancasila. ■

(eko/sc)/im. Foto: Eiko



Anggota Komisi VIII DPR RI asal Papua Muhammad Yudi Kotouky

## Putra Daerah Butuh Dukungan Pemerintah Bangun Daerahnya

Putra daerah seperti di Papua butuh dukungan fasilitas dari pemerintah agar mampu membangun daerahnya sendiri. Di Papua, sektor pendidikan, urusan haji, dan pengalokasian anggaran untuk pondok-pondok pesantren sudah seharusnya dikelola putra-putri daerah.

**D**emikian ditegaskan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Papua Muhammad Yudi Kotouky, saat mengikuti kunjungan kerja ke Jayapura, Papua, Kamis (2/11/2017). Menurut Yudi, sektor Pendidikan, haji, anggaran bagi pesantren jadi persoalan yang menonjol selama ini.

“Putra-putra asli daerah itu sebenarnya ingin bisa mengabdikan di desanya setelah mereka menempuh jenjang pendidikan yang baik, asalkan fasilitas, sarana, dan prasarananya didukung dan dilengkapi.

Selama ini, nasib mereka tidak diperhatikan, sehingga akhirnya mereka memilih untuk bekerja di daerah lain,” ungkap Yudi.

Yudi menegaskan, seharusnya putra daerah diberikan dukungan fasilitas yang layak, seperti tempat tinggal, gaji bulanan yang lancar, jatah beras, dan diprioritaskan untuk diangkat menjadi pegawai tetap. “Semua harus dibuktikan dan direalisasikan, bukan hanya sekadar janji omongan saja. Masyarakat Papua butuh bukti konkret,” tandas politisi PKS itu.



Terkait masalah konflik antarumat beragama yang pernah terjadi di Papua, Yudi mengemukakan, sesungguhnya toleransi antarumat beragama di Papua sangat kuat. Hal tersebut sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang terdahulu bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Hanya caranya saja yang berbeda.

“Konflik antarumat beragama di

Papua terjadi karena ada pihak-pihak yang mempolitisir dan memprovokasi masalah itu. Untuk mencegah dan menangani persoalan tersebut, perlu ada upaya pendekatan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemda kepada masyarakat guna mensosialisasikan dan memberi pengarahan secara langsung,” harapnya.

Selain itu ada juga permasalahan

di bidang sosial, seperti implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan masalah normalisasi sungai-sungai besar di daerah pedalaman. “Sungai-sungai besar di pedalaman seringkali menimbulkan bencana banjir yang merugikan masyarakat. Sampai saat ini tidak ada perhatian dari pemerintah untuk menangani masalah tersebut,” pungkasnya. ■

(dep) Foto: ryan dep.

## NTB Perlu Kembangkan Destinasi Halal Tingkat Dunia

Anggota Komisi XI DPR M. Sarmuji menekankan, seharusnya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan transformasi. Pasalnya ketergantungan kepada Newmont demikian besar terhadap pembangunan daerah, bahkan pertumbuhan ekonomi NTB sebagian besar didukung oleh Newmont. Begitu perusahaan tambang ini mengurangi produksi ekspor, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami kontraksi.

“ Karena itu perlu ditemukan leverage faktor (penggunaan aset dan sumber dana) selain tambang, untuk bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya ada potensi luar biasa NTB yakni wisata seperti pantai-pantainya cukup indah, budayanya beraneka ragam. Dan yang bisa dikembangkan secara khusus adalah wisata halal yang sekarang mulai merebak di seluruh dunia,” ungkap Sarmuji di sela-sela kunker ke NTB baru-baru ini.

Bahkan sambung dia, kalau NTB menjadi pusat wisata halal bagi destinasi dunia, insyaallah pertumbuhan ekonomi

NTB akan kembali tinggi. Menurut politisi Golkar ini, NTB harus bisa menemukan faktor yang bisa dijual dan menghasilkan pendapatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebetulnya sektor pariwisata sangat strategis, karena semua orang bisa terlibat di sektor ini, seperti industri kreatif, kuliner khas, kerajinan, hotel, serta restoran. Berbagai sektor itu bisa tumbuh serentak apabila sektor pariwisata dikembangkan dan NTB punya modal cukup besar untuk itu.

Sektor prioritas dalam pembangunan nasional pada 2017 salah satunya

adalah pariwisata. Bahkan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memprediksi tahun 2019 industri pariwisata mampu melampaui sektor migas sebagai penghasil devisa terbesar dengan nilai US\$24 miliar.

Halal tourism yang saat ini tengah gencar digarap oleh NTB dan sangat potensial berkontribusi dalam pencapaian target 20 juta wisatawan pada 2019 mendatang. Perkembangan pariwisata di NTB pun tergolong pesat dalam tiga tahun terakhir dengan pertumbuhan wisatawan yang tumbuh di atas 20 persen.

Dalam laporan tersebut dipaparkan

beberapa kekuatan Indonesia dalam melakukan program wisata halal antara lain berpengalaman dalam penyediaan tempat ibadah solat di area publik. Selain itu, atraksi untuk wisatawan berkembang baik dan banyak tersedia di Indonesia. Perkembangan hotel syariah dan tempat wisata yang memiliki value for money juga dimiliki oleh Indonesia. ■

(mp) Foto: Mastur



Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dipimpin oleh Soepriyatno (F-Gerindra) berfoto bersama dengan jajaran BI dan OJK Provinsi NTB.

## Pertumbuhan Ekonomi Kepri Jauh Di Bawah Rata-rata

Penurunan di beberapa sektor industri berbasis perkapalan, kelautan, dan industri alat-alat berat di Kepri megakibatkan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau (Kepri) jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,1%. Hal tersebut karena adanya penurunan permintaan serta persaingan ketat antarnegara tetangga.



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat memimpin pertemuan dengan mitra kerja Komisi XI DPR pada kunjungan kerja ke Provinsi Batam, Kepulauan Riau, Kamis (26/10).

“Sangat disayangkan Provinsi Kepri yang dikenal sebagai daerah prime mover economic atau penggerak ekonomi nasional justru mengalami persoalan penurunan pertumbuhan

ekonomi yang jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Tentunya ini harus segera diperbaiki karena Kepri ini merupakan daerah penyangga kita di daerah terluar terhadap Singapura,

Malaysia dan China,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir usai memimpin pertemuan dengan mitra kerja Komisi XI DPR dalam kunjungan kerja di Provinsi Batam, Kepri, Kamis (26/10).

Adanya ketidakkorelasi antara APBN dan APBD dianggap Hafisz sebagai penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Batam. Semestinya kebijakan ekonomi daerah yang bersumber pada kebijakan APBD harus bersinergi dengan yang sudah dicanangkan di APBN.

“Pemprov dan Pemda di Kepri ini seharusnya mampu mensinergikan antara pembangunan regional terhadap kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Penguatan basis industri dan produksi dalam negeri seharusnya bisa ditumbuhkembangkan di Provinsi Batam, Kepri ini,” ujar politisi F-PAN ini.

Lebih lanjut terkait dengan hasil pertemuan, Komisi XI DPR akan menindaklanjuti dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution. “Ini akan kami pertanyakan bagaimana Otorita Batam yang sudah didukung oleh zona ekonomi khusus tetapi tidak mampu melampaui daerah-daerah lain dalam hal pertumbuhan ekonominya,” imbuhnya.

Sementara Asisten II Provinsi Kepulauan Riau selaku perwakilan Gubernur Kepri dalam pertemuan mengemukakan, terbatasnya APBD Kepri karena memiliki beberapa catatan negatif. Oleh karena itu, Pemprov berharap adanya perbesaran struktur anggaran yang dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat Kepri secara langsung. ■

(tra.mp) foto:tiara

## Setjen dan BK DPR Launching Layanan PDM Berbasis TI

Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Mardian Umar secara resmi me-launching layanan penyaluran delegasi masyarakat (PDM) berbasis teknologi informasi. Diharapkan melalui sistem ini, masyarakat dapat mengetahui hal-hal terkait DPR secara lebih cepat dan responsif. Dirinya meyakini dengan sistem layanan ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR.

“Mudah-mudahan launching bimbingan teknis pengaduan masyarakat akan berjalan baik dan kami berharap dengan adanya launching ini penilaian masyarakat terhadap dewan bisa menjadi lebih baik,” ungkap Mardian, Rabu (01/11/2017) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ia mendorong agar seluruh perangkat kerja Setjen DPR dapat bekerja dengan cepat dan akuntabel dalam menyikapi masyarakat yang datang ke DPR. Ini yang menjadi maksud dalam layanan berbasis teknologi informasi, yakni untuk semakin mendekatkan DPR dengan masyarakat.

“Ini semua harus ada integritas, cepat, efisien, responsive, dan



# Operasionalisasi BLK Harus Diisi Tenaga Kompeten

Komisi IX DPR memberi apresiasi terhadap pemerintah Kota Manado dalam mengelola Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kapasitas angkatan kerja dalam memasuki kesempatan kerja.

**H**al itu tercermin dari upaya pembangunan yang dilakukan BLK Manado. Meski demikian, diingatkan bahwa pembangunan BLK juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas tenaga pelatih yang kompeten.

"Kita beri apresiasi pada Pemkot Manado yang semangat membangun BLK. Ini salah satu upaya mengantisipasi ledakan angkatan kerja supaya mereka bisa mengisi lapangan kerja secara lebih kualitas," ujar Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri usai meninjau BLK Kota Manado, Jumat, (27/10).

Ia menegaskan bahwa generasi millennial harus mampu mengisi peluang kerja di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Sehingga menyiapkan masyarakat yang berpendidikan dan terampil multak dilakukan.

"Kita harus mengisi peluang bonus demografi dengan menyediakan masyarakat yang berpendidikan, kesehatan yang baik, dan menyiapkan keterampilan supaya bisa berpartisipasi dalam peluang kerja," sambungnya.

Politisi Golkar ini juga mengingatkan bahwa pembangunan BLK harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak



Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri menerima cenderamata setelah meninjau BLK Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat (27/10).

hanya pembangunan fisik saja, tapi juga peningkatan operasionalisasi dan tenaga pendidikannya. Ini yang kerap dilupakan oleh pemerintah daerah, sehingga sering ditemukan BLK di daerah-daerah yang terbengkalai.

"Komisi IX DPR menyambut baik semangat Pemkot Manado. Kami mengingatkan pembangunan BLK itu lebih mudah. Yang jadi persoalan adalah kelanjutan BLK itu, termasuk

biaya operasional, pengadaan tenaga pelatih, dan lain-lain. Itu yang sering jadi persoalan," jelas Syamsul.

Karenanya, Komisi IX menaruh perhatian terhadap tindak lanjut BLK ini agar mampu menghasilkan masyarakat yang memiliki kompetensi di tengah maraknya tenaga kerja asing dan menghadapi arus globalisasi yang menempatkan kompetensi sebagai faktor yang paling diutamakan dalam lapangan kerja. ■

(hs,mp), Foto: Hendra



Deputi Administrasi Setjen DPR RI Mardian Umar member sambutan pada acara launching layanan Penyaluran Delegasi Masyarakat (PDM) berbasis teknologi informasi, Rabu (1/11).

akuntabel. Ini kita harus cepat menyikapi masyarakat yang datang ke DPR. Kalau tidak akan ada gangguan lain yang muncul di depan Gedung DPR. Dengan respon cepat akan menjadi lebih baik," terang Mardian.

Mardian juga menegaskan bahwa Setjen dan BK DPR selalu berpikir keras dalam menjawab dan menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Sistem layanan PDM berbasis TI adalah salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut. ■

(hs/sc) foto: kresno

# Tiga Unit Kerja DPR Dinobatkan Sebagai Penerima Anugerah Unit Kerja Terbaik KIP 2017

Dalam acara Seminar Keterbukaan Informasi Publik yang diadakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, ada tiga unit kerja di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR yang dianugerahi sebagai Unit Kerja Terbaik Keterbukaan Informasi Publik 2017.

**K**etiga unit kerja yang dianugerahi itu secara berturut-turut adalah peringkat terbaik pertama diterima oleh Bagian Sekretariat Komisi I DPR, peringkat terbaik kedua diraih Bagian Sekretariat Komisi III DPR, dan peringkat terbaik ketiga diterima Bagian Administrasi Keuangan DPR RI.

Sebelumnya, Plt. Sekjen DPR RI Damayanti menyampaikan bahwa seminar Keterbukaan Informasi Publik 2017 itu sebagai bahan untuk evaluasi bersama terhadap kinerja pelayanan informasi publik

di Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

“Semangat kelembagaan ini harus didukung dengan infrastruktur dan suprastruktur yang memadai untuk dapat mewujudkan keterbukaan informasi di DPR. Semangat PPID pada tahun ini bukan semata hanya ingin mengembalikan kejayaan pada masa lalu, tetapi tujuannya lebih substantif yaitu merelalisasikan cita-cita DPR RI sebagai Parlemen Modern, yang salah satu kinerjanya adalah keterbukaan informasi publik,” ucap Damayanti di

Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/11).

Selain PPID Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, turut hadir sebagai pembicara dalam acara Seminar itu yakni Komisioner Komisi Informasi Pusat, Henny S. Widyaningsih dan Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi.

KIP merupakan lembaga yang diberi amanat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai pengawal keterbukaan informasi publik. Oleh karenanya, kehadiran Komisioner Komisi Informasi Pusat dan Direktur Indonesian Parliamentary Center dalam seminar itu diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan implementasi dari Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. ■

(dep.mp) foto: jayadi



Para peraih penghargaan unit kerja terbaik Keterbukaan Informasi Publik 2017 Sekjen dan BK DPR RI



Penandatanganan MoU antara Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk dengan *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) untuk memperkuat riset bidang ekonomi di Gedung DPR RI, Kamis (2/11).

## BK DPR dan INDEF Tandatangani MoU Kerja Sama Riset Ekonomi

Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menandatangani kesepakatan (MoU) dengan *Institute for Development of Economics & Finance* (INDEF) guna memperkuat riset di bidang ekonomi. Kerja sama ini juga diharapkan memperkuat BK DPR, sebagai salah satu tim pendukung tiga fungsi Dewan, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Kita melakukan MoU karena kami memahami bahwa keahlian tidak hanya berada di DPR, tapi ada di mana-mana. Sepanjang itu bisa dikembangkan dalam meningkatkan peran BK DPR, perlu dilakukan kerja sama,” jelas Johnson, usai menandatangani MoU di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Penandatanganan MoU dengan INDEF dinilai Johnson penting karena salah satu hal yang BK DPR berikan kepada Anggota DPR adalah dukungan terkait aspek penganggaran dan APBN. Diketahui, INDEF merupakan salah satu lembaga yang menaruh perhatian secara khusus berkaitan dengan ekonomi dan

pembangunan.

“Karena itu, ini akan sangat bermanfaat apabila BK DPR bekerja sama dengan INDEF, karena hasil penelitian itu bisa dimanfaatkan dalam rangka memperkuat SDM yang sudah ada,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Pusat Kajian Anggaran BK DPR, Aceh Ahmad Saifullah. Ia mengatakan MoU ini merupakan hal penting bagi sejarah BK DPR, khususnya Pusat Kajian Anggaran. Pasalnya, selain memperkuat kelembagaan, BK DPR juga dapat meningkatkan kapasitas riset.

“Sebagai tindak lanjut dari kerja sama ini kita langsung menyelenggarakan workshop dengan tema ‘Optimalisasi Peran APBN

Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan,” jelasnya, seraya mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengembangan kerja sama dengan lembaga kajian yang lain guna penguatan kualitas lembaga.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif INDEF Eni Sri Hartati menyampaikan apresiasinya kepada BK DPR yang telah memberikan kepercayaan kepada lembaga kajian yang dipimpinnya untuk menjadi mitra strategis BK DPR.

“Amanah ini akan kami laksanakan tentu dengan sebaik-baiknya. Ke depan kita akan melakukan diskusi untuk saling bertukar informasi, pandangan, dan juga beberapa hal yang perlu kita kritisi,” jelasnya.

Adapun pandangan yang dipegang adalah objektivitas dan integritas. Apapun yang dilakukan INDEF arahnya adalah untuk melihat suatu fenomena yang ada, terutama dalam hal perekonomian. Karena konsen INDEF tidak pernah keluar dari kerangka sektor ekonomi.

“Panduan yang menjadi kiblat kami adalah kepentingan publik, apapun kebijakan yang dikeluarkan yang tidak sesuai kepentingan publik, pasti kita kritisi. Komitmen kita dedikasikan untuk mengawal kebijakan agar tidak melenceng atau sesuai yang diharapkan,” ungkapnya. ■

(rmm/sf/sc)



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Dubes Bangladesh Major General Azmal Kabir di DPR dan berdiskusi terkait krisis kemanusiaan di Myanmar, Rabu (01/11). Foto:andri

Wakil Ketua  
Komisi IX Syamsul Bachri saat  
meninjau BLK di Manado  
Rabu (01/11).  
Foto:andri



Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf menerima Duta Besar Kesultanan Oman untuk RI Nazzar bin Al-Julanda Alsaid, Rabu (08/11). Foto: arief